

**KONFLIK PEREBUTAN LAHAN ANTARA MASYARAKAT
DENGAN TNI PERIODE TAHUN 2002-2011**
(Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh:
Kardina Ari Setiarsih
08413244005

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "**Konflik Perebutan Lahan antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)**" ini telah memenuhi syarat dan siap untuk dipertahankan di depan tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.



Yogyakarta, 04 Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II


Puji Lestari, M. Hum
NIP.195608191985032001


Grendi Hendrastomo, M.M. MA
NIP. 19820117 200604 1 002

PENGESAHAN

Konflik Perebutan Lahan antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-
2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren,
Kabupaten Kebumen)




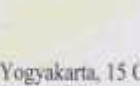
SKRIPSI

Disusun Oleh

Kardina Ari Setiarsih
NIM.08413244005

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Pada Tanggal 15 Oktober 2012 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Poerwanti Hadi P, M.Si	Ketua Penguji		17/10/2012
Puji Lestari, M.Hum	Sekretaris		17/10/2012
Nur Hidayah, M.Si	Penguji Utama		17/10/2012
Grendi Hendrastomo, MM. MA	Anggota Penguji		17/10/2012

Yogyakarta, 15 Oktober 2012
Dekan FIS
Universitas Negeri Yogyakarta,



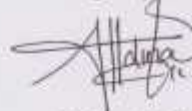
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Seluruh isi skripsi ini tetap menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila kemudian ditemukan ketidakberesan, maka saya bersedia menerima sanksinya.

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Yang menyatakan,



Kardina Ari Setiarsih

NIM 08413244005

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakansah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendak-Nya berharap. (Q. S Al-Insyiro: 6-8)

Jadilah seperti semut dalam ketekunannya. Dia berusaha merambat naik ke batang pohon hingga ratusan kaki, dan jatuh sebanyak jumlah yang sama. Tapi dia terus berusaha naik kembali akhirnya sampai pada tujuan yang diinginkan. Karena itu jangan cepat menyerah dan bosan. (Penulis)

Kita boleh kehilangan apa saja, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan, karena harapan adalah hal yang terindah dalam hidup kita. (Penulis)

Menulis skripsi adalah menaklukan diri sendiri (Anies Baswedan)

**KONFLIK PEREBUTAN LAHAN ANTARA MASYARAKAT
DENGAN TNI PERIODE TAHUN 2002-2011
(Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren,
Kabupaten Kebumen)**

ABSTRAK

Oleh:

Kardina Ari Setiarsih

08413244005

Masalah sengketa lahan memang sering muncul di Indonesia. Seperti masalah sengketa lahan yang terjadi di Kebumen yaitu konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Konflik ini disebabkan perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI, mengetahui upaya penyelesaian konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, dan mengetahui dampak sosial ekonomi setelah terjadinya konflik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai sikap dan fenomena yang ada. Informan dalam penelitian ini adalah warga Desa Setrojenar dan TNI. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan observasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI terjadi sejak tahun 2002. Faktor penyebab konflik; (1) faktor intern; status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas, Tanaman warga masyarakat rusak akibat latihan militer serta lahan yang digunakan untuk pertanian semakin sempit, perbedaan tujuan dalam pemanfaatan lahan, (2) faktor ekstern adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kebumen. Upaya penyelesaian melalui dialog dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada kesepakatan. Dari pemerintah membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan dari masyarakat melakukan dialog dengan pemerintah dan pihak TNI. Konflik ini telah mengakibatkan berbagai dampak dalam kehidupan, bukan hanya dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak positif yaitu bertambahnya solidaritas *in-group*, membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah. Dampak negatif yaitu hancurnya harta benda dan jatuhnya korban, membawa dampak psikologis, hubungan interaksi dan komunikasi terganggu.

Kata kunci: konflik, faktor, cara penyelesaian, dan dampak

PERSEMBAHAN



Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rizqinya, kupersembahkan karya ini sebagai wujud terimakasihku kepada :

- *Bapak dan Ibu yang tercinta, dan tersayang. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, dan semangat yang selama ini telah diberikan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan dan limpahan rizqi oleh Allah SWT*
- *Mba Festi, Mas Sara, Mas Bondan terimakasih atas doa, kasih sayang, dan nasihat yang tiada hentinya kepada adikmu ini, semoga selalu disimpahkan kesehatan oleh Allah SWT*
- *Sahabat-sahabatku tersayang, Mamah Anggit, Ateu Astri, Evi, Ari, Maulida, terimakasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungannya selama ini.*
- *Teman-temanku Ana, Enggar, Nike, Nia, Masruhan, Yoyo, Dito, Papi terimakasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungannya selama ini.*
- *Adik-adik kostku Didot, Ncit, Nuning, Giva, Icha, Tita, Intun, Anggi, Filma, Ais terimakasih atas kebersamaan, dan dukungannya.*
- *Almamaterku...*

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Konflik Perebutan Lahan antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)” ini dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., MA., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin guna melakukan penelitian.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah.
4. Ibu Puji Lestari, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Grendi Hendrastomo, M.M,M.A., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi terimakasih atas ilmu dan wawasan pengetahuan yang diberikan selama ini selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nur Hidayah. M.Si., selaku Narasumber yang telah memberikan saran dan kritik terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Poerwanti Hadi Pratiwi, M.Pd., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan membimbing penulis selama kuliah di Prodi Pendidikan Sosiologi.
8. Seluruh dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman sekaligus membekali penulis agar menjadi sukses.
9. BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Kebumen yang telah memberikan izin penelitian.
10. Bapak Kepala Desa Setrojenar yang telah menerima dan memberikan izin guna penyusunan skripsi ini.
11. Kepada masyarakat Desa Setrojenar yang telah menerima dengan baik dan memberikan informasi untuk data dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kedua orangtuaku yang tidak kenal lelah untuk selalu mendo'akan dari awal hingga akhir guna kelancaran penyusunan skripsi ini serta terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
13. Kakak-kakakku yang telah memberikan do'a dan dorongan semangat.

14. Teman-teman pendidikan Sosiologi Non Reguler angkatan 2008, atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih kurang dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dengan harapan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Pustaka	9
1. Konflik	9
a. Pengertian Konflik	9
b. Faktor penyebab konflik	10
c. Akibat terjadinya konflik.....	11
d. Cara penyelesaian konflik.....	12
2. Masyarakat	13
3. Masyarakat Militer/TNI	15
4. Lahan	16
a. Pengertian Lahan	16
b. Penggunaan Lahan	17
5. Teori Konflik Dahrendrof	18
6. Teori Lewis Coser	19
B. Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	28
B. Waktu Penelitian	28

C. Metode Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengambilan Sampel	33
G. Validitas Data	34
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Penelitian	39
1. Deskripsi Wilayah Kebumen	39
2. Deskripsi Wilayah Desa Setrojenar.....	40
3. Karakteristik Demografi	41
4. Kondisi Sosial dan Ekonomi	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
1. Deskripsi Informan Penelitian.....	44
2. Pembahasan dan Analisis	47
a. Kronologi konflik antara masyarakat dengan TNI ...	48
b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI	52
1) Faktor Intern	52
2) Faktor ekstren	59
c. Upaya Penyelesaian	63
d. Dampak yang terjadi setelah konflik.....	67
1) Dampak Positif	68
2) Dampak Negatif	71
C. Pokok-Pokok Temuan	76
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka berpikir	27
2. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	38

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan.....	41
2. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian	43
3. Kronologi kejadian serangan TNI dengan Masyarakat Desa Setrojenar (tanggal 16-17 April 2011)	51
4. Korban yang terkena pukul	72
5. Daftar sepeda motor yang dirusak oleh TNI	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instrument Penelitian.....	86
2. Hasil Observasi.....	91
3. Hasil Wawancara	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal ataupun horisontal. Konflik dapat berbahaya jika menyebabkan terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak sekali jenis konflik yang terjadi misalnya saja, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan lahan, konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukkan pihak lainnya.

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Sengketa agraria ini bahkan seringkali menimbulkan konflik yang

berkepanjangan dan memunculkan adanya kontak fisik antara pelaku dan hingga pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Kebumen akhir-akhir ini dimana adanya konflik antara TNI dan warga sekitar dalam memperebutkan lahan yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Konflik perebutan lahan memang konflik yang sering muncul dalam masyarakat. Konflik perebutan lahan merupakan konflik agraria, yaitu konflik yang disebabkan oleh ketidakmerataan, ketidakadilan, dan ketidakberdayaan mengakses faktor dan alat reproduksi pertanian (Sugeng Bayu Wahyono, dkk, 2004: 29).

Sengketa lahan yang terjadi antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan warga masyarakat bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa kasus konflik penggunaan lahan yang terjadi di Indonesia misalnya konflik yang pernah terjadi di Rumpin, pada tahun 2007 terdapat kasus sengketa lahan antara TNI AL dan warga Desa Alastlogo Pasuruan, Tanak Awu, di Cisompet Pada tahun 2007 terdapat kasus sengketa lahan antara TNI AU dan warga Desa Sukamulya Bogor (Suara Karya 2007, diakses melalui http://bitra.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=293:isw&catid=34:advokasi&Itemid=73 2), dan beberapa waktu belakangan ini adalah konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan TNI yang berada di desa Setrojenar Kabupaten Kebumen.

Konflik ini dikenal dengan sebutan Urutsewu. Hampir 29 tahun lamanya

tanah itu menjadi tempat latihan tentara. Perseteruan batas lahan mulai memuncak kembali tahun 2007. Warga mencari keadilan melalui berbagai upaya, lewat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Bupati Kebumen, dan ke Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) sekalipun. Namun, konflik tetap berkepanjangan, tak ada jalan keluar. Warga merasa tanahnya semakin mengecil.

Konflik ini berawal karena penolakan petani di 15 desa dari tiga Kecamatan (Milit, Ambal, Bulus Pesantren), di Kabupaten Kebumen terhadap rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (PUSLATPUR TNI AD). TNI mengklaim batas tanah negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara, dan membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, hingga muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo. Namun, warga bersikeras batas tanah TNI (Tentara Nasional Indonesia) hanya sampai sepanjang 220 meter dari garis pantai. Selama ini latihan tempur yang dilakukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) selalu saja mengakibatkan kerusakan tanaman petani dan tidak ada kompensasi yang layak diberikan pada petani.

Konflik yang terjadi menyebabkan bentrok antara masyarakat dengan TNI. Masyarakat juga melakukan unjuk rasa dan merobohkan papan Dislitbang (Dinas Penelitian dan Pengembangan) milik TNI (Tentara Nasional Indonesia) di gapura masuk menuju tempat latihan. Tidak hanya itu saja masyarakat juga melakukan aksi di jalan desa dengan membawa spanduk yang bertuliskan warga tolak pelatihan militer. Masyarakat yang melakukan aksi turun ke jalan tidak hanya

warga desa Setrojenar dan Brecong saja yang melakukan aksi tersebut tetapi semua masyarakat yang ada di kawasan Urutsewu pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen pada saat itu juga sedang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen, dengan pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan militer. Selain untuk kawasan militer, TNI juga mengokupasi tanah masyarakat untuk bangunan fisik. Di kawasan itu banyak terdapat bangunan infrastruktur Dislitbang AD (Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat) yang dibangun tanpa persetujuan para petani pemilik tanah.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI, maka dipandang perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Selain itu, peneliti juga mengkaji tentang upaya penyelesaian yang terjadi akibat adanya konflik serta dampak terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut:

1. TNI mengklaim batas tanah milik negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara, dan membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, sampai muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo.
2. Latihan militer yang dilakukan oleh TNI mengakibatkan kerusakan tanaman milik petani dan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada petani.
3. Adanya rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (PUSLATPUR TNI AD) di daerah pantai Urutsewu.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang menetapkan kecamatan Mirit sebagai kawasan pertahanan keamanan.

C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek tentang Konflik Perebutan Lahan antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas,

dapat dirumuskan permasalahan sebagai faktor utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi dari adanya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar.
2. Mendeskripsikan solusi atau upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar.
3. Mendeskripsikan dampak terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang

positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Sosiologi, pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan pengembangan studi konflik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang studi kajian Sosiologi yang ada dalam kehidupan masyarakat kita saat ini.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang masalah-masalah yang muncul selama ini terutama masalah konflik perebutan lahan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bekal pengetahuan dan

pengalaman secara nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya agar peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya sehingga dapat di ambil solusi yang terbaik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soerjono Soekanto, 2006: 91). Adapun definisi konflik menurut beberapa ahli yaitu:

- 1) Menurut Webster istilah *conflict* dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak (Pruitt dan Rubin, 2009: 9).
- 2) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekcoakan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan (dalam Novri Susan, 2009: 4).
- 3) Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009: 9). Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang

mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

Pengertian konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok. Pada konflik perebutan lahan ini terjadi konflik antar kelompok dengan kelompok yaitu antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI.

b. Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soerjono Soekanto, 2006: 91-92), antara lain:

1) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasasaan diantara mereka.

2) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

c. Akibat Terjadinya konflik

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan (Soerjono Soekanto, 2006: 95-96), adalah:

1) Bertambahnya solidaritas *in-group*

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.

2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi.

3) Perubahan kepribadian para individu

4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

d. Cara Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto, 1990: 77-78), yaitu:

1) *Coercion* (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

2) *Compromise*

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

3) *Arbitration*

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat.

4) *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin

komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

5) *Conciliation*

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995: 33). Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008 : 153).

2. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris yaitu *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab yaitu *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 2000: 144). Adapun definisi masyarakat menurut beberapa ahli yaitu (Soerjono Soekanto, 2006:

22):

- a. Menurut Maclver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem dari kekuasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.
- b. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- c. Sedangkan menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
- d. Menurut Abdul Syani, masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Abdul Syani, 2007: 30).

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat, yang ditaati dalam lingkungannya (Abu Ahmadi, 1997: 97).

Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu yang merupakan

anggota-anggotanya (Soleman B. Taneko, 1984: 11). Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup, adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Manusia yang hidup bersama,
- b. Mereka bercampur untuk waktu yang lama,
- c. Mereka sadar sebagai satu kesatuan, dan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama (Eko Murdiyanto, 2008: 83).

Berdasarkan pada pengertian tentang masyarakat dari beberapa tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama dalam kurun waktu lama dan menempati suatu wilayah tertentu dalam membentuk suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan.

3. Masyarakat Militer/TNI

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pertahanan menurut Kamus Besar Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1989 adalah :

- a. Perihal bertahan (mempertahankan).
- b. Pembelaan (negara dan sebagainya).
- c. Kubu atau benteng (yang dipakai untuk membela diri atau menangkis serangan).

Pertahanan negara adalah kesiapan negara untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekerasan terhadap kedaulatan negara, disintegrasi dan keselamatan bangsa. TNI adalah singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. "Tentara Nasional Indonesia", yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom masyarakat, serta pemberi pelayanan kepada masyarakat (diakses melalui <http://rezkyimmanuel.blogspot.com/2011/06/pengertian-tni-dan-struktur-jabatan-tni.html>).

Militer yang profesional adalah militer yang memiliki kecakapan, ketrampilan, pengetahuan dan tanggungjawab pada bidang hankam dan pada bidang non-hankam (sosial, ekonomi, politik dan sebagainya).

4. Lahan

a. Pengertian Lahan

Menurut Malingreau (1978:7), lahan adalah suatu wilayah gabungan antara unsur-unsur permukaan bumi yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya.

Johara T Jayadinata (1999: 10) mengartikan lahan sebagai tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya sudah ada pemiliknya, baik perseorangan maupun badan-badan tertentu.

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan manusia selalu mengolah lahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Keberadaan lahan sangat dibutuhkan oleh manusia selalu berusaha mengolah dan mengelola lahan yang ada sebagai upaya menjamin kelangsungan hidupnya.

b. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kehidupan manusia perlu pengolahan lebih lanjut, oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan atau keputusan pada suatu penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan interaksi antara dua faktor yaitu faktor manusia dan faktor lahan. Manusia merupakan faktor yang mempengaruhi atau yang melakukan kegiatan terhadap lahan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan merupakan faktor yang dipengaruhi sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk mencari nafkah.

Menurut Lindgren dalam Sutanto (1986: 2), penggunaan lahan adalah semua jenis penggunaan atas lahan oleh manusia yang meliputi penggunaan lahan untuk pertanian hingga lahan olahraga, rumah mukim hingga rumah makan, rumah sakit hingga kuburan. Penggunaan lahan

oleh manusia sangat tergantung pada aktivitas hidupnya. Penggunaan lahan timbul sebagai akibat adanya perubahan imbalan antara jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia.

5. Kajian Teori

a. Teori Konflik Dahrendorf

Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan *consensus*). Dahrendorf dengan teoritis konfliknya mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu didalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 154).

Dahrendorf memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. Kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi dan mereka adalah agen sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan personel anggota. Kelompok konflik, atau yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari

sekian banyak kelompok kepentingan tersebut (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 156-157).

Dahrendrof beranggapan bahwa konsep kepentingan laten (kepentingan yang tersembunyi atau terselubung) dan manifes (kepentingan yang tampak atau terlihat), kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik menjadi dasar bagi penjelasan konflik sosial. Aspek terakhir dalam teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dan perubahan. Secara ringkas, Dahrendrof juga menyatakan bahwa kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 284-285).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendrof mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Sama seperti pada konflik perebutan lahan antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI dimana konflik ini terjadi antara kelompok-kelompok yaitu antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI. Konflik ini memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yaitu oleh masyarakat desa Setrojenar dan oleh TNI.

b. Teori Lewis Coser

Menurut Coser (dalam Johnson, 1994: 196) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini. Dikatakan pula oleh Coser, bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan (*collectives*), atau antara individu-individu dengan kumpulan. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada di tempat orang hidup bersama. Konflik disebut sebagai unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya. Sebenarnya, telah lama kita ketahui bahwa seperti menghadapi musuh bersama menginteraksikan orang dalam satu kelompok yang dapat menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, dan dapat membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka (Bartens dan Nugroho, 1985:211).

Fungsi konflik yang positif paling jelas dalam dinamika kelompok-dalam (*in-group*) melawan hubungan kelompok luar (*out-group*). Menurut Coser (dalam Johnson, 1994: 196-197) kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok-dalam akan bertambah karena adanya

permusuhan atau konflik dengan kelompok-luar bertambah besar. Sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompak, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan, dan penyimpang mungkin lebih ditoleransi. Hal ini akan memungkinkan seorang individu untuk mengejar keinginan pribadinya.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan berbagai kajiannya akan menjadi masukan untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Nurfatimah (Skripsi, 2011), dari Pendidikan Sosiologi UNY, tentang “Konflik Sosial Dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Kretek Bantul”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penataan kawasan wisata Pantai Parangtritis, mengetahui bagaimana konflik sosial terjadi dalam penataan kawasan wisata Pantai Parangtritis, mengetahui upaya penyelesaian konflik dalam penataan wisata Pantai Parangtritis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, a) faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dibedakan

menjadi faktor intern dan ekstern. Faktor intern penyebab terjadinya konflik sosial dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis meliputi adanya ketidakberdayaan masyarakat setempat secara ekonomi, politik dan sosial. Sedangkan faktor ekstern terjadinya konflik sosial dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis meliputi: adanya pembangunan dan modernisasi yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah. b) Konflik Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis memiliki dua bentuk yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. c) Upaya Pemerintah Desa Pantai Parangtritis dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi konflik sosial dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis selama ini masih terbatas. Sulitnya upaya penyelesaian konflik sosial dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis tersebut terletak pada kakunya aspirasi dari pihak-pihak yang berkonflik.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah memiliki persamaan tentang konflik sosial yaitu tentang faktor penyebab serta upaya penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan metode penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Perbedaan dalam penelitian Nurfatimah, penelitian fokus pada penataan lahan yaitu tentang aspek pembangunan pada penataan kawasan wisata pantai

Parangtritis dan yang menjadi subyeknya adalah para pengunjung dan pedagang, sedangkan peneliti memfokuskan pada penggunaan lahan yaitu faktor-faktor terjadinya konflik penggunaan lahan yang menjadi subyeknya adalah masyarakat desa Setrojenar, pemerintah desa dan TNI.

2. Penelitian Eva Amalia yang dilaksanakan pada tahun 2001 mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Dengan Skripsi yang berjudul “Pembebasan Tanah dan Konflik Sosial (Studi tentang Kebijakan Pembangunan Kawasan Pariwisata Pulau Bintan)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan proses pembebasan tanah menimbulkan konflik dan bagaimana bentuk konflik tersebut terjadi dalam masyarakat setempat hingga menjadi dasar perilaku anarkis dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga yang kehilangan hak atas tanahnya kepada pihak yang pengelola pembangunan kawasan pembangunan kawasan pariwisata Pulau Bintan. Faktor yang mendasari konflik dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, ketidakberdayaan ekonomi, politik dan sosial, marginalisasi dan kecemburuan sosial, sedangkan faktor eksternal meliputi kekuatan yang bersumber dari luar struktur sosial masyarakat setempat yakni pembangunan, kapitalisme, krisis ekonomi dan perubahan struktur politik nasional.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pokok permasalahan yakni mengenai konflik dan perbedaan kepentingan yang berujung pada tindak

kekerasan. Selain itu, persamaan lain dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang faktor penyebab terjadinya konflik. Demikian halnya dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, observasi, maupun dengan dokumentasi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi dan fokus penelitiannya. Penelitian Eva mengambil lokasi di kawasan pariwisata di Pulau Bintan, sedangkan peneliti mengambil lokasi di kawasan Desa Setrojenar. Penelitian Eva hanya memfokuskan penelitiannya pada faktor-faktor penyebab konflik sosial yang terjadi dalam pembangunan kawasan pariwisata Pulau Bintan saja, sedangkan penelitian ini selain berupaya mengungkapkan faktor-faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI, juga berupaya mengungkapkan bagaimana upaya penyelesaian konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar.

3. Penelitian Febriana Muryanto (Skripsi, 2011), dari Pendidikan Sosiologi UNY, tentang “Faktor Penyebab Konflik Slemania dan Brajamusti Dalam Pesepakbolaan Didaerah Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik serta dampak konflik tersebut terhadap suporter baik dari Slemania maupun Brajamusti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik antara Slemania dan Brajamusti terjadi sejak tahun 2001. Faktor penyebabnya antara lain: a) Provokator dalam suporter, karena banyaknya anggota dari Slemania dan

Brajamusti, berdampak pada sulitnya kontrol yang dilakukan. Selain itu tindakan represif aparat keamanan juga menjadi faktor penyebab di dalamnya.

b) Strata tim, Slemania dan Brajamusti merupakan suporter resmi dari PSS dan PSIM. Konflik diantara mereka mempunyai hubungan dengan naik dan turunnya strata tim tersebut. Hal ini mengakibatkan animal power dari suporter muncul dan jika hasil yang diharapkan diluar harapan suporter maka frustrasi dan kekecewaan menghampiri suporter.

c) Derbi (dua atau lebih tim yang masih dalam satu daerah), Slemania dan Brajamusti mempunyai kedudukan yang berdekatan, hal ini menyebabkan pertemuan kedua organisasi suporter besar ini secara fisik sering bertemu.

d) Kinerja dari perangkat pertandingan. Bentuk konfliknya antara lain lagu-lagu rasis, bentrok fisik, serta ancaman-ancaman. Dampak konflik tersebut antara lain: luka fisik, Fobia, Finansial, tumbuhnya soolidaritas kelompok (*ashobiyah*) dan akomodasi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konflik sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian Febriana Muryanto, peneliti fokus pada faktor-faktor terjadinya konflik dan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Subyek yang diteliti adalah kelompok suporter sepak bola. Sedangkan peneliti memfokuskan pada dampak terjadinya konflik dan cara penyelesaiannya,

subyek yang diteliti adalah masyarakat desa Setrojenar dan TNI.

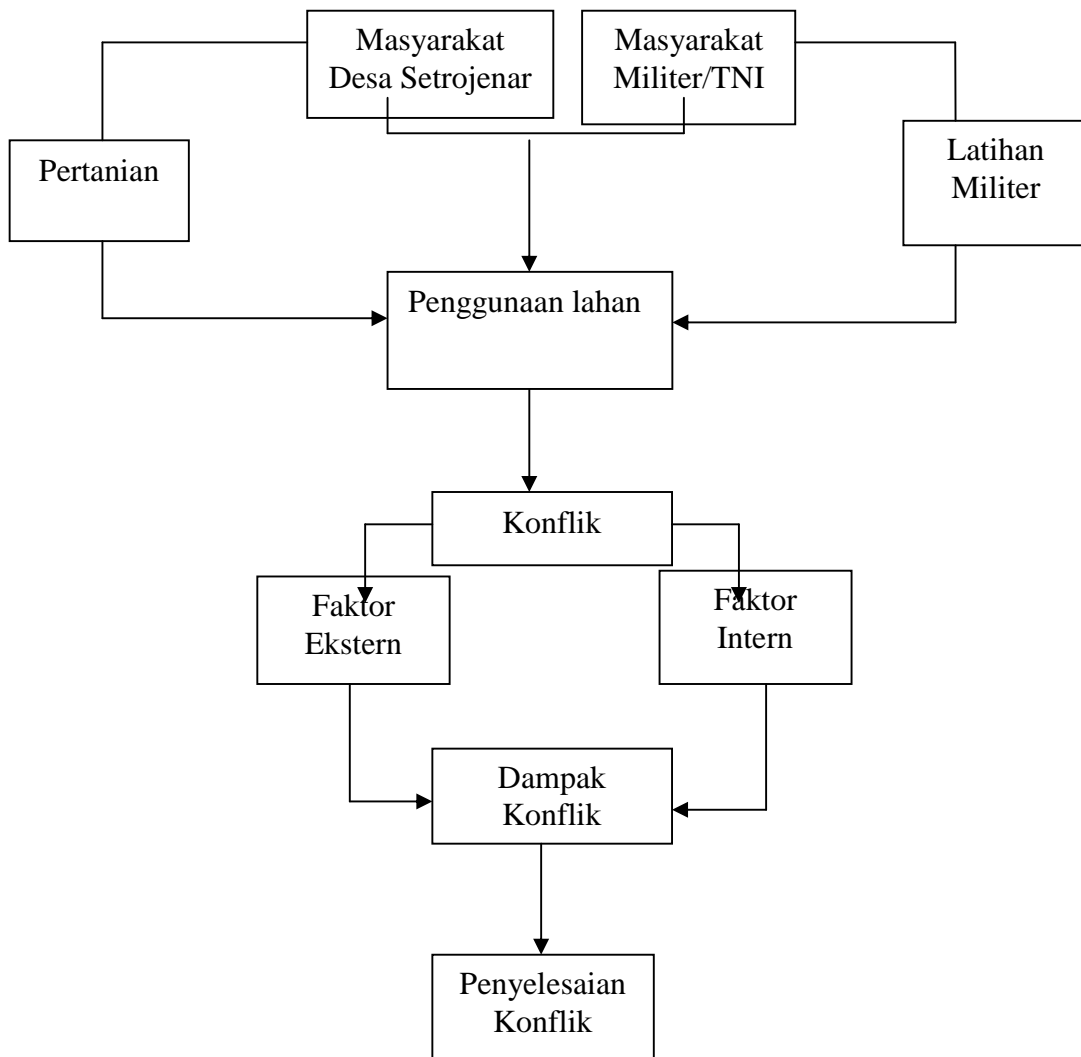
C. Kerangka Pikir

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan waktu yang lama serta memiliki nilai dan norma didalamnya. Masyarakat di pantai Urutsewu Desa Setrojenar dibagi menjadi masyarakat desa Setrojenar dan masyarakat militer/TNI. Sebagian besar masyarakat desa Setrojenar adalah petani, sehingga lahan pada masyarakat Desa Setrojenar digunakan untuk pertanian. Berbeda dengan masyarakat militer/TNI, dimana mereka menggunakan lahan untuk latihan militer.

Perbedaan penggunaan lahan tersebut, menimbulkan konflik antara masyarakat Desa Setrojenar dengan masyarakat militer/TNI. Konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok.

Konflik yang terjadi ini muncul karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Konflik yang terjadi menyebabkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak sosial maupun ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Setrojenar maupun oleh TNI. Terjadinya suatu konflik dapat memunculkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan sehingga tercapai

suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkonflik.



Bagan I. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena ingin meneliti tentang faktor penyebab konflik, dampak yang terjadi akibat konflik dan cara penyelesaian dari konflik tersebut. Masalah ini sudah berkali-kali dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu diantara mereka.

Sasaran penelitian ini adalah tentang faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, dampak terjadinya konflik serta cara penyelesaian dari konflik perebutan lahan ini.

B. Waktu Penelitian

Penelitian tentang Konflik Perebutan Lahan antara Masyarakat dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dilaksanakan selama 4 bulan yaitu dimulai dari bulan April - Juli 2012.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah

wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya (Lexy J. Moleong, 2010: 4-11).

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk memperoleh data secara lengkap maka pengambilan data dilaksanakan langsung di lokasi penelitian. Pengambilan data melalui informan-informan yang lebih mengetahui tentang konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Informan-informan yang lebih mengetahui tentang masalah tersebut yaitu masyarakat Desa Setrojenar, Kepala Desa Setrojenar dan TNI.

D. Sumber dan Jenis Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 2010: 157). Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui informan. Perolehan data juga didapat peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga peneliti juga dapat memperkuat data-data yang diperoleh dari responden dengan apa yang diamatinya secara langsung.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Setrojenar yang terlibat konflik, kepala Desa Setrojenar, dan TNI (Tentara Nasional Indonesia).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan.

3. Foto/Dokumentasi

Selain menggunakan sumber data berupa kata-kata/tindakan dan sumber tertulis, peneliti juga menggunakan sumber data berupa foto untuk mendokumentasikan tindakan. Foto sudah lebih banyak digunakan sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan digunakan untuk menelaah segi subjektif yang hasilnya dianalisis secara induktif (Lexy J. Moleong, 2010: 157-160). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto kejadian pada saat konflik, foto peneliti wawancara dengan informan, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009: 224). Penelitian

ini menggunakan sumber data secara lisan dan tertulis, sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Menurut Nasution (Sugiyono, 2009: 226), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyatakan bahwa, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Peneliti akan mencatat informasi secara sistematis yang berkenaan dengan apa yang disaksikan dan ditemukan selama penelitian, yaitu terkait dengan konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Pencatatan yang sistematis tersebut dapat berupa catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2010: 144). Dalam penelitian ini observasi dilakukan ditempat yang dijadikan obyek penelitian, yaitu konflik penggunaan lahan di Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2010: 186).

Esterberg (Sugiyono, 2009: 231), mendefinisikan wawancara atau

interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti dalam teknik ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur dilakukan dengan peneliti membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk tanya jawab dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Setrojenar yang terlibat konflik, masyarakat militer/TNI, Pemerintah Desa Setrojenar.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto pada saat terjadinya konflik, serta berita-berita yang diambil dari surat kabar.

4. Kepustakaan

Guna kelengkapan data dan informasi untuk penelitian ini, maka penelitian menambahkan data dari buku-buku, kajian literatur, karya tulis ilmiah, artikel koran, artikel dari internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian dan terdapat berbagai macam teknik sampling dalam penelitian (Sugiyono, 2009: 52). Dalam penelitian kualitatif sampling, digunakan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*). Sampling adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul (Lexy J. Moleong, 2010: 224). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada acuan dan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti (Sugiyono, 2009: 53-54).

Penelitian ini mengambil sampel siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Maka jumlah yang diambil tidak ditentukan batasannya. Informan yang dipilih melalui berbagai pertimbangan dan kriteria. Penentuan informan yang berasal dari warga desa, dipilih berdasarkan dua kriteria. Pertama adalah informan yang mengetahui konflik secara langsung dan yang menjadi korban pada saat konflik terjadi. Kriteria kedua adalah informan yang bersumber dari kepala Desa Setrojenar, hal tersebut dipilih berdasarkan posisi dan wewenangnya dalam struktur pemerintahan yang ada di desa, serta keterlibatannya dalam penanganan konflik.

Dari sekian banyak warga dan TNI sebagai informan, yang berhasil digali informasinya secara mendalam dan dianggap sudah cukup adalah sejumlah 5 orang warga, 1 orang kepala Desa Setrojenar, dan 2 orang TNI, jadi informan seluruhnya berjumlah 8 orang.

G. Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2010: 320). Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data ini penulis membagi dua cara, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dari hasil informan dengan menggunakan metode wawancara kepada informan lainnya, yang berbeda. Kedua adalah triangulasi metode merupakan teknik pengumpulan data yang sejenis dan dilakukan dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti melakukan teknik wawancara dan observasi yang kemudian hasilnya dibandingkan.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi yang ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah warga Desa Setrojenar, kepala Desa Setrojenar dan TNI. Peneliti kemudian melakukan perbandingan informasi dari berbagai sumber agar tidak dibohongi. Pencarian informan dihentikan ketika sudah tidak ada lagi variasi informasi dan informasi dirasakan cukup mewakili permasalahan yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data atau dokumen lain yang terkait untuk melakukan perbandingan terhadap berbagai informasi yang didapatkan sehingga data yang dihasilkan menjadi akurat. Data wawancara dengan informan akan dibandingkan dengan data observasi di lapangan tempat kejadian dan dengan dokumen pada saat terjadinya konflik.

2. Diskusi dengan *expert* (ahli). Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan *expert* (ahli) dalam bentuk konsultasi atau diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkapkan dan diketahui. *Expert* (ahli) dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing. Diskusi yang dilakukan dengan pembimbing mengenai konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI

(Tentara Nasional Indonesia).

3. Diskusi dengan teman.

Teknik yang dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan dalam bentuk diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian dapat segera diungkap dan diketahui. Dalam diskusi akan terjadi proses interaksi antara peneliti dengan rekan diskusi. Melalui tukar-menukar informasi maka peneliti akan mendapat masukan yang positif terhadap penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2010: 248).

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif (Miles dan Huberman, 2009: 15).

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis (Miles dan Huberman, 2009: 16).

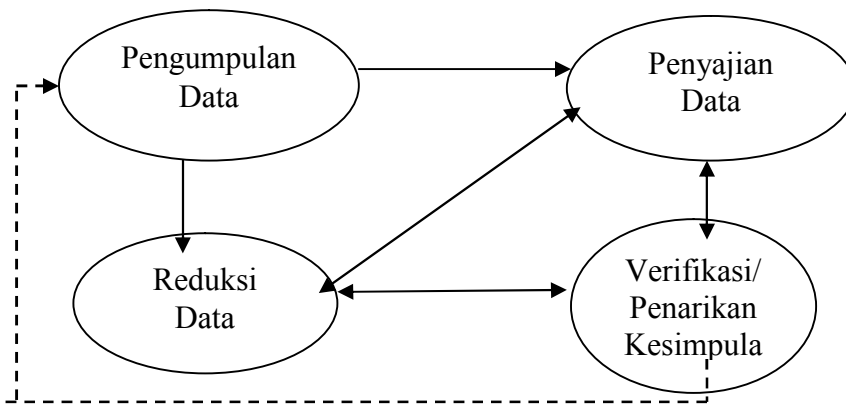
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut (Miles dan Huberman, 2009: 17).

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan

makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Skematis proses analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen berada di dalam wilayah provinsi Jawa Tengah, dan terletak pada bagian selatan. Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Purworejo di sebelah timur.

Letak Kabupaten Kebumen pada peta adalah antara 7° sampai 8° lintang selatan dan 109° – 110° bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,5 hektar atau 1.285,115 kilometer persegi. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan, 1930 Rukun Warga (RW) dan dibagi menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Sementara ini, penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 berdasarkan proyeksi penduduk mencapai 1.242.437 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 adalah 969 jiwa tiap km^2 . Daerah Kabupaten Kebumen di bagian utara berupa perbukitan terutama di Kecamatan Sadang, Karangsembung, Sempor, dan Alian, sedangkan di bagian selatan pada umumnya berupa dataran rendah, kecuali di beberapa tempat di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Ayah (Sumber: Data Pemerintah Kebumen, 2008).

2. Deskripsi Wilayah Desa Setrojenar

Penelitian ini dilakukan di Desa Setrojenar. Dimana Desa Setrojenar merupakan salah satu desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang terletak di pesisir pantai selatan. Desa Setrojenar terdiri dari enam Dukuh yaitu Dukuh Duren, Dukuh Cengkerek, Dukuh Godi, Dukuh Kepek, dan Dukuh Kuang.

Berdasarkan peta Adminstratif Desa Setrojenar skala 1 : 20.000, letak astronomis Desa Setrojenar adalah antara $7^{\circ}45'50''$ LS – $7^{\circ}47'12''$ LS dan $109^{\circ}39'20''$ BT – $109^{\circ}41'00''$. Jarak Desa Setrojenar dengan suatu pemerintah kecamatan adalah 0,5 kilometer dan jarak dari Ibukota Kabupaten Kebumen adalah 12 kilometer. Luas Desa Setrojenar yaitu 252,827 hektar. Terdiri dari 184,185 ha ladang/tegal dan pemukiman seluas 68,642 ha. Selebihnya ada 16,301 ha tanah Kas Desa, lapangan 1,392 ha dan lainnya 16,140 ha.

Batas Wilayah Desa Setrojenar yaitu:

Sebelah utara : Desa Bocor, Desa Walyo, Kecamatan Buluspesantren

Sebelah timur : Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren

Sebelah selatan : Samudera Hindia

Sebelah barat : Desa Ayam Putih, Kecamatan Buluspesantren (Sumber: Monografi Desa Setrojenar 2010).

3. Karakteristik Demografi

a. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah seluruh penduduk Desa Setrojenar adalah 2875 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1446 jiwa dan sisanya perempuan 1429 jiwa, terhimpun 760 KK. Di Desa Setrojenar, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari pada penduduk laki-laki tetapi perbandingannya hampir seimbang (Sumber: Monografi Desa Setrojenar 2010).

b. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk Desa Setrojenar menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Presentase
1.	Pendidikan Dasar (SD, SM)	1052	57, 63
2.	Pendidikan Menengah (SMA)	674	39,70
3.	Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana)	56	2,67
	Jumlah	1782 jiwa	100 %

Sumber : Monografi Desa Setrojenar 2010

Dari tabel 1 diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Setrojenar sebagian besar adalah pendidikan Dasar (57, 63 persen), kemudian pendidikan Menengah (39, 70 persen), dan sebagian kecil adalah pendidikan Tinggi (2, 67 persen). Tingkat pendidikan yang

rendah disebabkan karena keterbatasan biaya dan mahal nya biaya pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Setrojenar lebih memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat Desa Setrojenar memilih untuk bekerja sebagai petani. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mempertahankan lahan yang digunakan sebagai pertanian. Karena penghasilan utama masyarakat Desa Setrojenar adalah hasil pertanian yang dikelola di lahan tersebut.

c. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, baik sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Komposisi penduduk Desa Setrojenar berdasarkan mata pencaharian dapat digolongkan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1269 orang
2.	Buruh tani	281 orang
3.	Buruh swasta	194 orang
4.	Pegawai negeri	45 orang
5.	Pengrajin	94 orang
6.	Pedagang	73 orang
7.	Peternak	13 orang
8.	Montir	6 orang
9.	Polri/ABRI	15 orang
10	Perangkat desa	14 orang
Jumlah		2004 orang

Sumber : Monografi Desa Setrojenar Tahun 2010

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Setrojenar bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan karena desa Setrojenar memiliki kondisi lahan yang memang mendukung untuk pertanian serta lahan yang luas menyebabkan masyarakat mempertahankan hak kepemilikan tanah dan menginginkan tanah tersebut sebagai tanah pertanian.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk

Masyarakat Desa Setrojenar sebagian besar adalah memeluk agama Islam yang patuh dan taat beribadah serta saling menghargai antar sesama pemeluk. Di Desa Setrojenar memiliki tempat beribadah berupa musholah dan masjid.

Berdasarkan demografi Desa Setrojenar pada tahun 2010 sebagian besar yang memeluk agama Islam yaitu 2875 orang.

Di Desa Setrojenar, rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani. Berdasarkan data demografi Desa Setrojenar, hasil tanaman pangan yang terbanyak adalah tanaman jagung yaitu 80 hektar menghasilkan 5,6 ton/ha, tanaman padi 40 hektar menghasilkan 3 ton/ha, tanaman semangka 20 hektar menghasilkan 18 ton/ha, tanaman cabai 10 hektar menghasilkan 35 ton/ha, tanaman kedelai 5 hektar menghasilkan 1,5 ton/ha. Total Keluarga petani desa Setrojenar yang memiliki lahan ada 649 KK. 624 KK diantaranya memiliki lahan dibawah 0,5 ha, hanya ada 25 KK yang kepemilikan lahannya antara 0,5 hingga 1 ha. Di luar itu masih ada 71 KK petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Ketiadaan lahan telah menjadi problem nyata bagi banyak keluarga petani penggarap atau buruh tani ini (Sumber: Monografi Desa Setrojenar 2010).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum Informan

a. Mas An (Nama samaran)

Mas An merupakan warga desa Setrojenar tepatnya di daerah Dukuh Kepek. Ia sudah lama tinggal di desa tersebut semenjak 23 tahun yang lalu, sudah dari kecil dia tinggal di desa Setrojenar.

Banyak informasi yang dapat digali dari mas An ini, karena dia

merupakan orang yang berperan aktif dalam pembelaan tanah milik warga tersebut. Mas An ini juga ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah ini dan untuk mencari penyelesaian yang tepat dalam mengatasi masalah ini.

b. Bapak Sg

Bapak Sg merupakan warga asli Desa Setrojenar, tepatnya tinggal di dukuh Godi. Bapak Sg berumur 36 tahun, ia tinggal bersama istri dan satu anak perempuan yang masih kecil. Ia bekerja sebagai petani sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Bapak Sg selain bekerja sebagai petani beliau juga sebagai aktifis di LBH Phakis. Beliau ikut dalam lembaga ini untuk membela warganya tentang hak kepemilikan tanah. Banyak sekali informasi yang didapat dari bapak Sg ini, karena beliau tau tentang sejarah awal mula terjadinya masalah ini. Pada saat ada perkumpulan dengan Bupati, kepala Kodim, ketua Dislitbang, serta perwakilan masyarakat untuk membahas tentang masalah kejelasan hak kepemilikan tanah yang memang itu milik warga Setrojenar, bapak Sg mengikutinya.

c. Bapak Im

Bapak Im merupakan warga asli Desa Setrojenar, tepatnya tinggal di dukuh Godi. Bapak Im berumur 38 tahun, ia bekerja sebagai petani dan sebagai guru ngaji di desanya. Ia memiliki istri dan 3 anak perempuannya. Bapak Im juga sebagai korban pada saat terjadi konflik ada tanggal 16

April 2011. Ia ditangkap oleh TNI dan hampir dipukuli oleh TNI. Tidak hanya itu saja beliau juga kehilangan motornya karena dirusak oleh TNI.

d. Bapak Pr

Bapak Pr ini tinggal di desa Setrojenar sudah sejak kecil. Tetapi pada saat dewasa beliau merantau untuk mencari kerja. Setelah menikah beliau menetap lagi di Desa Setrojenar dan bekerja sebagai petani. Sekarang umur bapak Pr 40 tahun. Bapak Pr juga memiliki tanah di sekitar tempat yang dijadikan sebagai tempat latihan oleh TNI. Kadang tanamnya rusak akibat tanahnya digunakan untuk tempat latihan militer.

e. Bapak Nr

Bapak Nr adalah warga Desa Setrojenar. Ia hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Akhir). Bapak Nr tinggal di dukuh Kepek bersama anak dan istrinya. Sekarang ia berumur 40 tahun. Ia adalah mantan kepala desa di Desa Setrojenar. Setelah tidak menjabat sebagai kepala desa, ia bekerja sebagai petani. Pada saat ia sebagai kepala desa, masalah ini sudah muncul dan sampai sekarang belum menemukan titik temu yang pas.

f. Bapak Sp

Bapak Sp merupakan Kepala Desa Setrojenar. Beliau tinggal bersama istri dan satu anaknya. Beliau Sehari-hari ia bekerja di kantor kelurahan untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai aparat

desa, Sp mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Selain bekerja sebagai kepala desa, beliau juga sebagai petani di Desa Setrojenar. Tidak hanya itu saja, beliau juga sebagai korban penembakan pada saat terjadinya konflik.

g. Bapak Wd

Bapak Wd adalah seorang kepala Dislitbang, beliau berumur 40 tahun. Beliau asli dari kebumen, tinggal bersama istri dan dua orang anaknya Penempatan kerjanya sebagai kepala Dislitbang sejak tahun 2009. Banyak sekali informasi yang didapat dari bapak Wd, tentang masalah perebutan lahan ini.

h. Bapak Mt

Bapak Mt adalah seorang anggota TNI AD (Tentara Nasional Indonesia) di Korem wilayah Desa Setrojenar, berumur 39 tahun. Banyak informasi yang didapatkan tentang akar masalah yang terjadi mengapa terjadi bentrokan antara TNI dengan warga Desa Setrojenar.

2. Pembahasan dan Analisis

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soejono Soekanto, 2006: 91). Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan, konflik perebutan lahan antar masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar merupakan bentuk konflik vertikal. Alasannya karena ada perbedaan tingkat kekuasaan yang dimiliki antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak TNI memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hanya rakyat biasa.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik untuk menganalisis konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI terjadi karena masyarakat ingin mempertahankan hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya pengklaiman yang dilakukan oleh TNI terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Konflik yang terjadi mengakibatkan banyak korban. Tercatat beberapa warga masyarakat Desa Setrojenar yang menjadi korban kebrutalan TNI yaitu ada yang terkena luka tembak, luka pukul serta kerusakan sepeda motor yang dilakukan oleh pihak TNI. Adapun data mengenai konflik yang terjadi, pada peneliti tentang faktor penyebab terjadinya konflik, dampak konflik bagi masyarakat serta upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai berikut:

a. Kronologi Konflik antara Masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Menurut Fisher *et al* (2001), menyatakan bahwa kronologi konflik disebut juga sebagai urutan kejadian dimana merupakan suatu alat bantu

yang dipergunakan untuk menunjukkan sejarah suatu konflik berdasarkan daftar waktu kejadiannya (tahun, bulan/hari, sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat bantu ini dapat menjadi "*starting point*" dalam memahami dan mengungkap konflik karena dapat mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak atau pihak lain yang nantinya digunakan untuk kepentingan sendiri atau bersama dengan pihak lain.

Konflik ini mulai terjadi pada tahun 2002, masyarakat sudah menyadari dan mulai berani untuk memprotes kegiatan latihan militer. Pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 14 Maret diadakan pertemuan, yang dihadiri oleh Wakil Pemkab Kebumen, DPRD Kabupaten Kebumen, Wakil Dislitbang TNI AD, Komandan Kodim 0709 Kebumen, Kapolres Kebumen, dalam pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi terhadap TNI untuk tidak melakukan kegiatan apapun di kawasan Urutsewu sebelum ada penyelesaian secara permanen.

Pada tahun 2010, adanya Raperda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang berisikan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan membuat para petani geram dan mendatangi DPRD untuk meminta kejelasan. Pada saat itu belum terjadi bentrok antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI, masih bersifat unjuk rasa/demo untuk menyampaikan aspirasinya.

Pada 2011 terjadi konflik antara masyarakat dengan TNI terjadi

bentrok/kontak fisik. Sebelumnya pada tanggal 23 Maret 2011 warga Desa Setrojenar melakukan pertemuan, membahas tentang status sengketa tanah dengan DPRD Kebumen. Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh pihak TNI AD. Hasil pertemuan tersebut adalah pernyataan lisan DPRD bahwa selama belum diambil keputusan lebih lanjut, TNI tidak diperbolehkan mengadakan latihan tempur di wilayah yang di persengketakan itu. Pada awal April, pihak dari Pemerintah Desa mendapat surat pemberitahuan bahwa tanggal 11 April 2011 akan dilakukan latihan. Tanggal 10 April 2011 TNI dari Yogyakarta sudah datang, hal ini menyebabkan masyarakat marah dan melakukan blokade karena mengaggap TNI melanggar keputusan yang sudah disepakati sebelumnya (Suara Keadilan, 2011: 19-20).

Kronologi serangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan warga Desa Setrojenar (pada tanggal 16 April – 17 April 2011) sebagai berikut:

Tabel 3. Kronologi konflik antara masyarakat Desa Setrojenar TNI pada tanggal 16-17 April 2011

Waktu kejadian	Keterangan
Sabtu, 16 April 2011	<p>Pukul 09.30 WIB : Sekitar 30 orang warga yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan mengadakan ziarah kubur ke makam 5 anak yang menjadi korban ledakan mortir pada tahun 1997.</p> <p>Pukul 12.00 WIB : TNI membongkar blokade yang dibuat oleh warga. Blokade tersebut dibuat beberapa titik, pada tanggal 11 April 2011 dari pohon waru dan kayu-kayu. Di luar dugaan, ternyata TNI menyerbu ke arah warga dengan tembak-tembakan. Warga yang panik kemudian tercerai berai lari. Selanjutnya terjadi aksi-aksi pemukulan oleh para tentara. Tidak hanya sampai di situ, TNI juga mengejar dan melakukan penyisiran (sweeping).</p> <p>Pukul 15.00 WIB: TNI melakukan penangkapan terhadap warga dan tokoh, diantaranya Nur Hidayat (39), Muhajir (30), Paryono (39), Solekhudin (19), Marifun (31), Imam (36).</p> <p>Pukul 15.00-17.00 WIB: TNI menyisir rumah-rumah warga di Desa Setrojenar. Warga tidak ada yang berani keluar. Beberapa warga dianiaya.</p>

Minggu, 17 April 2011	<p>Pukul 10.30-18.30 WIB: Polisi menangkap kembali 4 warga Desa Setrojenar yaitu Johan, Adi Waluyo, Solehan dan Yono. Sehingga pada tanggal 17 April 2011 sudah 10 warga yang diperiksa oleh Polisi.</p> <p>Pada pukul 18.28 WIB: Ada 7 warga yang berstatus saksi diperbolehkan untuk pulang yaitu Hidayat bin Muchdin (39), Muhajir bin Saia (30), Paryono bin Dullah Afandi (39), Solekhudin bin Sadir (19), Marifun bin Jumain (31), Imam Zuhdi bin Muh Samidja (36), sedangkan 3 warga ditetapkan sebagai tersangka.</p>
-----------------------	---

(Sumber: bapak Sg, wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 12.30 WIB)

b. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan TNI di desa Setrojenar

Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor penyebab konflik ada empat yaitu perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sama seperti yang dikatakan oleh Soerjono, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Setrojenar, pemerintah setempat, dan pihak TNI juga, dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Ada faktor internal dan eksternal penyebab munculnya konflik perebutan lahan yang terjadi di Desa Setrojenar. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Faktor Intern Penyebab Konflik Perebutan Lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI (Tentara Nasional**

Indonesia)

Faktor intern merupakan faktor yang terjadi dari dalam individu maupun kelompok yang berkonflik. Seperti halnya yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Terdapat beberapa faktor intern yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut, sebagai berikut:

(a) Status Kepemilikan dan Batas tanah yang tidak jelas

Tidak adanya kejelasan tentang status kepemilikan tanah dan batas tanah menjadi faktor penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas menimbulkan masing-masing pihak melakukan pengklaiman terhadap tanah tersebut. Warga Desa Setrojenar mengklaim tanah tersebut milik mereka dan mereka mempunyai bukti-bukti surat tanah atas kepemilikan lahan di sepanjang pantai yang berada di wilayah Kecamatan Mirit, Ambal dan Kecamatan Bulupesantren. TNI-pun tidak mau kalah dengan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik mereka. Anggapan TNI menganggap tanah sepanjang pantai itu sebagai tanah negara yang diperuntukkan bagi lahan latihan pertahanan dan keamanan TNI Angkatan Darat.

Seperti yang dikatakan oleh mas An, yaitu “warga sini memiliki bukti atas kepemilikan tanah berupa C desa mbak. Kalau

dulu itu SPPT mbak atau petuk” (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2012, pukul 16.30 WIB). Dari pihak TNI juga sama mengaku bahwa tanah tersebut milik TNI dengan bukti SHNo 4/1994, dimana dasar hukum kepemilikan lahan itu adalah penyerahan tanah oleh KNL pada tanggal 25 Juni 1950, dan Keppres No 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai departemennya. Dasar hukum lain berupa Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara pada Denzibang 1/IV Yogyakarta nomor: 012.22.035.044E02.000. KP dan periode semester II tahun anggaran 2010 nomor: BA.SMT2-002.TNI/WKN.09/KNL.06/2011, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Seperti yang dikatakan bapak Wd, pada saat wawancara yaitu:

“Para TNI latihan dikawasan ini sudah sejak tahun 1949, dari pihak kami memiliki surat bukti SHNo 4/1994, Keppres No 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai tempatnya, dan surat izin dari Bupati bahwa kami boleh mengadakan latihan uji coba senjata di Desa Setrojenar ini mbak” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 10.00 WIB).

Status kepemilikan dan batas tanah menyebabkan pengklaiman dilakukan oleh masing-masing pihak. Ini menjadi faktor terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Kedua belah pihak merasa memiliki surat keterangan

yang legal dan sah sebagai pemilik sah pengguna lahan tersebut. Setelah ditelusuri di BPN Kebumen ternyata tanah yang memiliki sertifikat tersebut hanya berupa mess atau bangunan dislitbang dan yang milik masyarakat juga berupa bangunan yang berlantai tiga, selebihnya adalah tanah negara.

(b) Tanaman pertanian milik masyarakat rusak akibat latihan militer

Latihan militer yang dilaksanakan di Desa Setrojenar menimbulkan kerusakan tanaman milik warga Desa Setrojenar. Tidak hanya itu saja kegiatan pertanian juga terhambat karena adanya latihan militer. Dari pihak TNI yang ada di dislitbang tidak memberikan ganti rugi sama sekali terhadap tanaman yang rusak akibat latihan militer. Seperti yang dikatakan oleh bapak Pr:

“ Pada saat latihan militer, tanaman kita rusak mbak. Terus masyarakat harus memberikan uang kepada pihak dislitbang agar tanamannya tidak rusak mbak pada saat latihan militer. Sambil kita ngasih uang ke pihak TNI kita juga bilang mbak, tanamannya jangan dirusak gitu mbak”. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 10.24 WIB).

Tanaman yang rusak dan lahan pertanian yang semakin kecil menjadi faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar. Inilah yang membuat masyarakat desa Setrojenar menolak adanya latihan militer. Tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pihak Dislitbang TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) terhadap tanaman

pertaniannya yang dirusak.

Di perkuat lagi dengan perkataan Bapak Im sebagai berikut:

“Pihak TNI kalau latihan itu seenaknya saja mbak. Orang ada tanaman ya diinjek saja tanamannya. Jadinya ya tanaman rusak, tidak diberi ganti rugi lagi. Terus mengganggu kegiatan pertanian mbak, pada saat itu Bapak Nr mau menyiram semangka dilarang oleh TNI. Padahal semangka kan membutuhkan penyiraman setiap hari. Jadi warga diberi waktu untuk menyiram tanaman itu malam hari mbak.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 12.20 WIB).

Berbeda dengan yang dikatakan oleh warga, dari pihak TNI sendiri mengatakan bahwa tanaman yang dirusak diganti oleh TNI. Seperti yang dikatakan bapak Wd bahwa:

“Kami latihan dikawasan ini sudah lama, dan tanaman yang rusak dari pihak kami menggantinya. Tidak hanya itu saja, pihak kami juga membiarkan warga Desa Setrojenar menanam tanaman hortikultura di area sekitar latihan. Dari dulu kita hidup berdampingan tidak ada masalah, ketika ada masalah bentrok pada saat tanggal 16 April 2012 saya kaget juga dan diluardugaan mbak.”

Tanah di Desa Setrojenar memang sangat penting sekali, karena itu merupakan sebagai kegiatan pertanian dengan ditanami berbagai macam jenis tanaman. Karena sebagian besar penduduk Desa Setrojenar adalah petani maka mereka melakukan tindakan untuk menolak adanya latihan militer. Kawasan Desa Setrojenar jika dijadikan sebagai kawasan untuk latihan militer maka akan mengganggu aktivitas pertanian yang ada di Desa Setrojenar. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr, bahwa: “Masyarakat

kurang bebas beraktivitas terutama dalam kegiatan pertanian dan peternakan mbak”.

(c) Perbedaan tujuan atau kepentingan dari masing-masing pihak

Masing-masing yang berkonflik memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Pihak dari masyarakat menginginkan tanahnya dijadikan sebagai tempat untuk pertanian dan pariwisata. Sedangkan dari pihak TNI dan pemerintah daerah menginginkan tanah tersebut untuk kawasan pertahanan dan untuk latihan militer.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat Desa Setrojenar milih untuk bekerja sebagai petani. Sekitar 1269 orang di Desa Setrojenar bermatapencarian sebagai petani, selebihnya sebagai buruh swasta. Hal ini menyebabkan masyarakat mempertahankan lahan yang digunakan sebagai pertanian. Karena penghasilan utama masyarakat Desa Setrojenar adalah hasil pertanian yang dikelola di lahan tersebut. Sehingga masyarakat berjuang untuk mempertahankan lahan yang dijadikan sebagai latihan militer.

Dalam pandangan Dahrendrof, konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan (dalam Novri Susan, 2009: 49-50). Sama yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI yaitu perbedaan tujuan atau

kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI menjadi fakta yang paling penting sebagai penyebab terjadinya konflik. Masyarakat Desa Setrojenar menginginkan lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sg sebagai berikut:

“Saya dan warga desa disini menginginkan lahan tersebut sebagai kawasan pertanian mbak. Karena pertanian merupakan sumber penghidupan kami. Kalau lahan tersebut dijadikan kawasan latihan militer kami mau hidup dari mana mbak, warga disini rata-rata bekerja sebagai petani.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pada pukul 12.20 WIB).

Dari pihak TNI menginginkan lahan tersebut dijadikan sebagai lahan untuk latihan militer. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mt bahwa: “kawasan disini sangat strategis mbak, untuk tempat latihan uji coba senjata.” (Wawancara pada tanggal 7 Juli 2012, pada pukul 10.30 WIB).

Perbedaan tujuan atau kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI merupakan faktor penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Menurut Soerjono Soekanto tentang faktor penyebab konflik, maka perbedaan tujuan ini termasuk dalam faktor penyebab konflik pada perbedaan kepentingan, yaitu masing-masing memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri, dari pihak masyarakat Desa Setrojenar memiliki kepentingan ingin

menjadikan lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan pariwisata sedangkan dari pihak dislitbang TNI AD menginginkan sebagai lahan untuk latihan militer karena tempatnya yang strategis dan luas.

Dahrendrof mengatakan bahwa masyarakat yang cenderung berkonflik agar perubahan sosial terjadi. Kelompok konflik dipicu oleh kepentingan. Kelompok konflik dalam Terkait dengan teori Dahrendrof yang memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok, yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 156). Masyarakat yang memicu terjadinya konflik karena menginginkan perubahan dimana lahan yang dijadikan sebagai latihan militer diganti sebagai lahan pertanian dan pariwisata. Kelompok semu dalam konflik ini yang terjadi di Desa Setrojenar adalah TNI yang memiliki kepentingan untuk latihan militer dan melakukan uji coba senjata dan kegiatan ini dianggap wajib untuk dilakukan di daerah Setrojenar. Kelompok kepentingan dalam konflik ini adalah TNI yang memiliki kepentingan untuk latihan militer dan melakukan uji coba senjata serta masyarakat Desa Setrojenar yang memiliki kepentingan untuk pertanian. Kelompok konflik dalam konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah warga Desa Setrojenar dan TNI.

2) Faktor Eksternal Penyebab Konflik Perebutan Lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yaitu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kebumen.

Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang dari awal sudah ditolak oleh masyarakat Desa Setrojenar. Kebijakan Pemkab tersebut berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta terkait dengan persetujuan Pemkab terhadap adanya penambang pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang Jakarta di kawasan Pantai Urutsewu. Kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berisi tentang dijadikannya kawasan Pantai Urutsewu sebagai kawasan Pertahanan dan Latihan Militer. Seperti yang dikatakan bapak Sg, sebagai berikut:

“Tanah sini dijadikan untuk latihan militer maka secara spontan akan merubah status kepemilikan yang sudah dimiliki oleh warga sejak dulu. Kalau seperti itu jadi 0 lagi status kepemilikan tanahnya mbak, kalau adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Padahal masyarakat menginginkan tanah tersebut sebagai kawasan wisata dan pertanian .” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 11.45 WIB).

Munculnya rencana proyek pembangunan JLSS (Jalan Lintas Selatan Selatan) juga menjadi penyebab memanasnya situasi masalah tersebut. Adanya proyek JLSS (Jalan Lintas Selatan Selatan) akan menghilangkan aset tanah milik warga. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr sebagai berikut:

“Pada saat adanya rencana pembangunan JLSS, kan warga disini yang tanahnya dijadikan sebagai JLSS mendapat ganti rugi dari Pemkab. Waktu itu pihak Bina Marga sedang melakukan pemasangan patok untuk area mana saja yang akan dijadikan sebagai JLSS (Jalan Lintas Selatan Selatan) dan TNI juga tiba-tiba memasang patok dan meminta ganti rugi terhadap Pemkab mbak.” (Wawancara pada tanggal 31 Mei, pukul 11.36 WIB, dirumah bapak Nr).

Kebijakan dan peraturan daerah berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu faktor terjadinya konflik penggunaan lahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, menurut Soerjono Soekanto salah satu bentuk konflik adalah pertentangan antar kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang terjadi karena perbedaan kepentingan yaitu antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI. Seperti halnya yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI, masing-masing pihak memiliki kepentingannya. Tidak hanya itu, ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dalam masalah ini. Lahan yang digunakan tidak hanya sebagai latihan militer saja, tetapi ada juga pihak yang menginginkan adanya penambangan pasir di daerah tersebut. Apabila diijinkannya penambang pasir besi tersebut yaitu pihak TNI mendapatkan uang dari pihak penambang pasir besi tersebut.

Menurut pendapat Pruitt dan Rubin tentang definisi konflik yaitu sebagai sebuah persepsi mengenai kepentingan atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik

tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009: 9). Sama seperti konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI yang merupakan konflik kepentingan dalam artian masing-masing pihak memiliki kepentingannya masing-masing. Pihak dari petani memiliki kepentingan bahwa kawasan tersebut sebagai kawasan pertanian dan pariwisata, sedangkan dari pihak lain seperti Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yaitu sebagai kawasan latihan militer serta sebagai kawasan penambangan pasir besi. Aspirasi dari pihak yang berkonflik belum menemui titik temu yang pas dan sepaham.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kawasan Desa Setrojenar seharusnya lebih dipikirkan kembali dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Setrojenar. Jika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disahkan oleh Pemerintah maka akan merugikan masyarakat Desa Setrojenar. Dimana sebagian besar masyarakat Desa Setrojenar adalah petani, jika lahan yang digunakan untuk pertanian digunakan untuk latihan militer. Maka masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau Rencana Tata Ruang Wilayah disahkan maka kebijakan yang menjadikan kawasan Setrojenar sebagai kawasan pertahanan dan sebagai kawasan latihan uji coba senjata itu ditiadakan atau dihapus. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini harus memikirkan semua pihak, jangan memikirkan satu pihak saja

karena akan merugikan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pihak Pemerintah harus lebih memikirkan kembali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama.

Adanya konflik perebutan lahan membuktikan bahwa penataan ruang di Indonesia masih belum jelas atau masih carut marut. Di dalam undang-undang No 26 tahun 2007 dijelaskan bahwa penataan ruang termasuk juga dalam penataan Kawasan Latihan Militer harus melihat pada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat terutama menjamin pada perlindungan mereka. Kejelasan dalam status kepemilikan tanah memang sangat penting, agar tidak terjadi konflik seperti di Kebumen ini. Selain itu, juga harus berlandaskan hukum yang mempertimbangkan rasa keadilan serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Di dalam undang-undang tersebut juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti tata guna lahan, penetapan zoning, serta melihat pada kondisi sosial dan budaya yang ada pada masyarakat.

c. Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian konflik dalam konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, pihak-pihak lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa dialog saja

dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasinya bahwa tanah itu milik TNI maupun milik masyarakat. Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hanya berupa dialog tetapi belum ada keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr sebagai berikut:

“Upaya pemerintah ada tapi agak sedikit ragu, ketika kita bicara wewenang terkait dengan masalah TNI. Jadi kaya gini mbak, ada saat kita membahas masalah ini, dan berbicara wewenang dari pihak pemerintah mengatakan tidak ada wewenang, jadi masih mengambang tidak ada kejelasan.” (wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 11.36 WIB).

Penjelasan dari bapak Nr dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini belum ada kejelasan. Dari pihak pemerintah belum berani memutuskan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Masih ragu untuk mengambil keputusan, karena dari masing-masing pihak ada yang pro dan ada yang kontra. Menyebabkan masalah tersebut sulit untuk diselesaikan. Upaya memang sudah dilakukan beberapa kali seperti yang dikatakan oleh bapak Im sebagai berikut:

“Sebelumnya pada tahun 2002 sudah melakukan dialog dengan TNI tetapi tidak ada kesepakatan. Terus pada tahun 2007 melakukan audiensi kedewan BPN menyatakan bahwa TNI tidak memiliki tanah di daerah Setrojenar tetapi ketika masalah ini muncul pihak BPN mengatakan kalau masyarakat tidak memiliki bukti terhadap kepemilikan tanah. Pada tahun 2009 melakukan dialog dengan Bupati, komandan dislitbang, dan masyarakat tentang penyelesaian yang tepat. Pada saat itu masyarakat meminta kejelasan tentang hak kepemilikan tanah serta

masyarakat meminta tidak ada latihan militer di daerah ini apabila belum ada kejelasan. Oleh pihak Bupati sudah disetujui tetapi kenapa malah TNI memaksa untuk latihan.” (wawancara pada 29 Mei 2012, pukul 12.20 WIB).

Melihat hasil wawancara dari bapak Im dapat dikatakan bahwa masih belum ada kejelasan yang tepat terhadap kepemilikan tanah. Pemerintah daerah tidak tegas dalam mengatasi masalah tersebut. Dari pihak TNI juga sudah mengadakan perundingan dengan masyarakat desa Setrojenar, seperti yang dikatakan oleh bapak Wd sebagai berikut:

“Dari pihak kami sudah mengadakan perundingan dengan masyarakat sini mbak, tapi masyarakat malah melakukakn kebrutalan dengan merobohkan papan gapura dislitbang yang ada di depan dan merusak gudang senjata milik kami mbak”.

Walaupun sudah mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak tetapi tidak ada kesepakatan, itu sama saja. Apabila penyelesaian masalah tersebut tidak ada pihak ke tiga, yang netral, adil, bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan, maka sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Tidak hanya itu saja, tidak adanya komunikasi dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Konflik akan menjadi sulit untuk diatasi ketika aspirasi masing-masing pihak menjadi kaku dan semakin menetap (Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2009: 9). Kakunya aspirasi dari kedua belah pihak yang berkonflik mempertegang hubungan antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemui kesepakatan bersama. Sebenarnya konsensus dapat diupayakan jika mereka mau duduk bersama dan berkompromi sehingga tidak ada

yang merasa dirugikan dalam masalah ini.

Masing-masing pihak saling memperkuat pendapatnya, dari pihak petani atau warga Desa Setrojenar mengatakan bahwa mereka memiliki bukti berupa Leter C desa, itu sebagai bukti kepemilikan tanah desa. Sedangkan pihak TNI juga sama, yaitu memiliki bukti berupa SHNo 4/1994, Keppres No 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai tempatnya, serta surat ijin dari Bupati untuk melakukan latihan di kawasan Desa Setrojenar. TNI juga tidak mau kalah mengklaim bahwa tanah sepanjang pantai itu sebagai tanah negara yang diperuntukkan bagi lahan latihan pertahanan dan keamanan TNI Angkatan Darat.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah dengan membentuk pansus, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Sg, bahwa:

“Pihak pemerintah daerah pada saat itu membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini. Pansus tersebut terdiri dari 9 orang mbak, tetapi masing-masing memiliki pendapatnya sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra dengan masalah ini.” (wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 11.45 WIB).

Dari pemerintah desa sendiri sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini, seperti hasil wawancara dengan bapak Sp, bahwa:

“Saya sendiri selaku kepala desa disini sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah desa merupakan perwakilan dari rakyat mbak, jadi kami mendatangi Bupati dan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini, tapi belum ada keputusan yang tepat, sampai sekarang masih diproses terus

mbak.” (Wawancara pada tanggal 9 Mei 2012, pukul 15.00 WIB).

Cara penyelesaian konflik ini memang sangat sulit, harus ada pihak ketiga yang menangani masalah ini. Pihak ketiga ini harus benar-benar netral, bijaksana, dan tegas, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Seperti yang disebutkan, menurut Soerjono Soekanto tentang cara penyelesaian konflik yaitu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pihak ketiga, pihak ketiga harus melakukan beberapa langkah seperti, arbitrase (*arbitration*) dimana pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, yang kedua mediasi (*mediation*), mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dan tepat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut.

Upaya sudah dilakukan yaitu dengan *mediation* dimana pihak yang menjadi penengah adalah pemerintah daerah kebumen dengan membentuk pansus, tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pembentukan pansus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari hasil wawancara saya dengan masyarakat, bahwa masyarakat Desa Setrojenar lebih menginginkan tempat latihan dipindah tidak di daerah Desa Setrojenar tetapi mencari daerah yang luas untuk latihan

militer dan uji coba senjata. Dapat dikatakan bahwa penanganan konflik ini, dari pihak pemerintah dan institusi terkait baik dari daerah maupun pusat masih lambat dalam menangani masalah tersebut, sehingga tidak ada titik temu yang tepat.

d. Dampak yang terjadi Setelah Konflik

Dengan terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI telah berdampak besar bagi kedua belah pihak yang telah berkonflik. Dampak tersebut bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Dampak Positif

Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, et. al., 2001: 4). Menurut Coser (dalam Johnson, 1994: 196) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini. Dampak positif yang terjadi akibat terjadi konflik ini adalah:

- (a) Bertambahnya solidaritas *in-group*

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar telah menjadikan dari masing-masing yang berkonflik memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan diantara mereka. Menurut Coser (dalam Johnson, 1994: 196) kekuatan solidaritas internal dan intergrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan dan konflik dengan kelompok luar bertambah besar.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI, menjadikan masyarakat desa tersebut ikatan kesatuan dan solidaritasnya semakin kuat. Hal ini terlihat pada saat warga Desa Setrojenar dimasukan kedalam penjara karena dianggap bersalah masyarakat Desa Setrojenar secara bersama-sama selalu datang dalam persidangan dan selalu membela anggota masyarakatnya yang dianggap bersalah. Seperti yang diungkapkan oleh Mas An sebagai berikut:

“Kesatuan dan solidaritas yang ada pada warga masyarakat desa Setrojenar menjadi semakin kuat akibat konflik. Saat konflik terjadi, mereka secara bersama-sama mempertahankan blokade yang dibuat dan mempertahankan hak milik mereka yaitu tanah mereka yang memang benar-benar milik mereka. Sekarang ini masyarakat menjadi berani untuk memertahankan haknya sebelumnya masyarakat belum berani setelah masalah ini muncul masyarakat menjadi berani untuk mempertahankan hak yang memang menjadi miliknya.” (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2012, pukul 16.30 WIB)

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pr: “Persatuan masyarakat Desa Setrojenar semakin kuat dan berani dulu masyarakat belum berani sekarang dengan munculnya kejadian ini masyarakat menjadi berani. Pada saat beberapa warga disini dipenjara dan akan disidang masyarakat Desa Setrojenar secara bersama-sama datang untuk memberi dukungan terhadap mereka yang dijadikan tersangka mbak”. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 10.24 WIB). Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat menjadi lebih berani lagi untuk mengungkapkan apa yang menjadi hak dan keinginannya. Tidak hanya itu saja, solidaritas ada masyarakat menjadi kuat setelah terjadinya konflik pada bulan April.

Solidaritas *in-group* muncul dan semakin kuat karena mereka merasa memiliki kesusahan dan kepentingan yang sama yaitu, lahan pertanian dijadikan sebagai lahan untuk latihan militer. Sehingga masyarakat bersatu untuk mempertahankan lahan pertanian yang memang menjadi hak milik mereka.

(b) Membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah

Terjadinya konflik (2002-2011) telah membuat berbagai pihak memikirkan bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI membawa dampak yang sangat besar, yaitu jatuhnya korban manusia dan

rusaknya motor. Masyarakat desa Setrojenar sangat berharap konflik tersebut dapat terselesaikan dan mencapai kesepakatan diantara pihak yang berkonflik agar tidak terjadi bentrokan lagi antara masyarakat dengan TNI. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Im, sebagai berikut: “kami berharap masalah ini dapat terselesaikan, agar kami tahu bagaimana hak kepemilikan tanah disini dan tidak terjadi bentrok lagi.”

Konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar menyadarkan berbagai pihak bahwa ada banyak masalah yang sebelumnya tidak diketahui. Saling introspeksi diri antara kedua belah pihak bagaimana upaya yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi bentrok untuk kedua kalinya. Kedua belah pihak menyadari bahwa perlu adanya upaya penyelesaian yang tepat agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

2) Dampak negatif

Konflik yang terjadi di Desa Setrojenar, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Adanya dampak negatif akibat konflik ini adalah sebagai berikut:

(a) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan pasti akan menimbulkan kerugian, baik secara materi berupa rusaknya sepeda motor maupun jiwa-raga manusia. Konflik antara

masyarakat dengan TNI terjadi beberapa hari dan memuncak pada tanggal 16 April 2011. Setelah terjadi konflik pada tanggal 16 April 2011, membawa dampak kerugian baik itu materi maupun non materi bagi masyarakat. Berikut ini para korban yang terkena pukulan, serta tembak dari TNI:

Tabel 4. Daftar para korban pada saat konflik terjadi pada tanggal 16-17 April 2011

No	Nama	Asal	Mulai Dirawat	Luka yang diderita
1.	Samsudin (28 th)	Setrojenar	16 April	Luka memar pada bagian punggung kanan, luka robek kepala kanan atas karena dipoor senjata.
2.	Kusriyanto (29 th)	Setrojenar	16 April	Bagian pantat sebelah kanan terkena peluru.
3.	Mustofa (65 th)	Setrojenar	16 April	Luka memar dan mata kiri bengkak karena kepala dan wajah diinjak-injak tentara.
4.	Surip Supangat (38 th)	Setrojenar	16 April	Ditembak pada bagian tangan dan pantat.
5.	Sarwadi (29 th)	Setrojenar	16 April	Ditembak pada paha kanan atas.

6.	Aris Panji	Divisi Litbang FKS	16 April	Pelipis kanan robek, mulut robek.
7.	Mulyanto (21 th)	Setrojenar	16 April	Ditembak bagian punggung.
8.	Ilyas (35 th)	Setrojenar	16 April	Ditembak dipunggung kiri.
9.	Kasantri (19 th)	Setrojenar	16 April	Patah tulang kaki kiri, dipukuli tentara dengan poor dan pentungan.
10	Martijo (37 th)	Setrojenar	16 April	Ditembak ditangan kanan.
11	Bajuri	Setrojenar	17 April	Paha kanan terkena pantulan peluru, kepala bagian belakang sakit karena dipoor senjata.
12	Ahyadi	Setrojenar	17 April	Memar punggung dan leher
13	Samirin	Setrojenar	17 April	Memar paha, betis punggung.
14	Sarmo	Setrojenar	17 April	Memar paha, betis punggung.

Sumber: bapak Sp selaku Kepala Desa Setrojenar

Rata-rata korban itu tidak tahu apa-apa, jadi mereka sedang melakukan kegiatan seperti biasa yaitu di sawah. Tiba-tiba TNI melakukan penembakan terhadap masyarakat yang sedang di sawah tersebut.

Sepeda motor yang dirusak oleh TNI terhadap motor masyarakat

Tabel 5. Sepeda motor masyarakat yang dirusak oleh TNI

No	Jenis	Nomor Polisi
1.	RX – KING	AB 4528
2.	YAMAHA FIZR	AA 5731 AM
3.	SUPRA X	AA 3796 CM
4.	YAMAHA JUPITER	AA 2978 RW
5.	YAMAHA FIZR	6119 NS
6.	JUPITER Z	-
7.	SUPRA FIT	AA 3746 CW
8.	KAWASAKI NINJA	B 4900 I
9.	SUPRA X 125	AA 4852 W
10.	HONDA WIN	AA 9704 HD
11.	SHOGUN 125	R 6082 RH
12.	SMASH	AA 2677 NM

Sumber: bapak Sp selaku Kepala Desa Setrojenar

b) Membawa dampak pada Psikologis

Konflik yang terjadi pada tanggal 16 April 2011 berdampak besar terhadap kondisi psikologis warga, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka merasa takut dan trauma akibat konflik tersebut, seperti yang dikatakan Mas An: “Anak-anak juga sempat trauma dengan kejadian tersebut. Malah ketika nglia TNI anak-anak langsung lari dan bilang ke orang tuanya kalau ada TNI mbak. Pokoknya anak-anak merasa takut mbak kalau ada TNI”. (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2012, 16.30 WIB).

Dengan kejadian tersebut warga mengalami trauma yang mendalam. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa juga turut menjadi korban. Penyisiran yang dilakukan oleh TNI

ternyata berdampak bagi kondisi mental mereka. Sampai sekarang beberapa diantaranya merasa takut bila melihat sosok TNI. Anggapan ini diperkuat dengan perkataan bapak Nr sebagai berikut: “Masyarakat trauma dengan adanya sikap brutal dari TNI, terutama anak-anak dan perempuan mbak.”

c) Hubungan interaksi dan komunikasi menjadi terganggu

Dampak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI sangatlah besar. Bukan hanya bersifat material maupun bersifat non material. Komunikasi dan interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan TNI setelah terjadi konflik semakin memburuk dan menjadi tidak harmonis.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr:

“Hubungan dengan TNI kurang harmonis apalagi dengan anggota litbang yang bertugas mbak. Kalau saya lihat anggota TNI kaya ketakutan, sekarang jarang menampakan diri misalnya kumpul-kumpul dengan masyarakat. Ada juga mbak yang minta pindah kerjanya tidak di litbang lagi, ada juga yang pindah seolah-olah kaya menghindar dengan masyarakat mbak.” (wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 11.35 WIB).

Tanggapan tersebut diperkuat lagi oleh tanggapan bapak Sg sebagai berikut: “Saya akui mbak kalau saya pribadi memang tidak suka dengan sikap TNI setelah kejadian ini. Anggapan masyarakat tentang TNI dulu seperti dewa sekarang tidak percaya lagi dengan TNI.” (Wawancara pada tanggal 29

Mei 2012, pada pukul 12.20 WIB).

Pihak TNI juga merasakan hal yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Mt, sebagai berikut: “hubungan kami dengan warga disini setelah terjadi bentrokan kemarin itu memang menjadi tidak harmonis lagi mbak. Mungkin karena masyarakat merasa sakit hati dengan sikap kami sehingga masyarakat sini menjadi tidak ramah dengan kami.” (Wawancara pada tanggal 7 juli 2012, pada pukul 10.30 WIB).

C. Pokok Temuan Penelitian

Pokok temuan dalam penelitian mengenai konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI berupa faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern dari penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah a) Status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas,

b) Tanaman milik masyarakat rusak akibat latihan militer, c) Perbedaan tujuan dalam pemanfaatan lahan. Sedangkan faktor ekstern penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah adanya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemerintah Daerah Kebumen.

2. Konflik yang terjadi antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI merupakan konflik terbuka yang bersifat vertikal.

Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI merupakan konflik terbuka. Konflik tersebut berakar dalam dan nyata, sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya. Konflik tersebut merupakan konflik yang bersifat vertikal. Karena konflik tersebut terjadi antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Dimana masing-masing memiliki kepentingan dan memiliki kedudukan yang berbeda atau tidak sederajat. TNI lebih memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hanya rakyat biasa.

3. Solusi/ Upaya Penyelesaian dalam menangani konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI.

a. Dari Pemerintah

Solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang terkait serta membentuk pansus untuk menyelidiki masalah tersebut tetapi belum ada titik temu yang tepat.

b. Masyarakat

Solusi yang dilakukan oleh masyarakat sudah berkali-kali dilakukan yaitu dengan melakukan dialog dengan pemerintah dan pihak TNI ada kesepakatan dimana TNI tidak boleh melakukan latihan sebelum ada kejelasan mengenai masalah tersebut. Tetapi pihak TNI tetap saja memaksa untuk melakukan latihan uji coba senjata.

Warga desa Setrojenar sudah sering melakukan demo untuk mengeluarkan aspirasi kepada pemerintah daerah atas latihan militer yang dilakukan oleh TNI serta meminta kejelasan terhadap tanah yang memang benar-benar milik masyarakat tersebut. Tetapi aksi tersebut tidak di dengar oleh pemerintah daerah. masyarakat melakkan aksi demo mendapat dukungan dari LBH Phakis Kebumen, LBH Yapi Solo, PMII Kebumen. Lembaga inilah yang membantu masyarakat mengeluarkan aspirasinya serta membantu masyarakat ketika beberapa warga Desa Setrojenar ada yang dipenjara.

4. Solidaritas atau persaudaraan masyarakat Desa Setrojenar semakin kuat setelah terjadinya konflik.
5. Kondisi sosial warga Desa Setrojenar setelah terjadi konflik semakin maju karena tidak ada lagi latihan militer di daerah Setrojenar dan warga bisa melakukan kegiatan pertanian dengan bebas dan nyaman.
6. Pada tanggal 16 April 2012, diadakan perhelatan untuk mengenang satu “Setahun Tragedi Setrojenar”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi dari tidak adanya UU yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan. Sengketa lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI AD terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di sana. Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu saja, masalah ini timbul juga karena adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan Pertahanan dan sebagai kawasan untuk latihan militer. Pengklaiman yang dilakukan oleh TNI menyebabkan lahan yang dijadikan sebagai pertanian menjadi sempit serta tanaman yang ditanam rusak akibat latihan militer.

Terjadinya konflik mengakibatkan dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak negatif maupun berdampak positif. Dampak negatif yang pertama berupa hancurnya harta benda, dalam hal ini terbukti 13 warga Desa Setrojenar menjadi korban pemukulan serta penembakan yang dilakukan oleh TNI. Tidak hanya itu saja, beberapa warga Desa Setrojenar juga mengalami kerugian berupa rusaknya sepeda motor mereka akibat dirusak oleh TNI. Yang kedua yaitu membawa dampak psikologis, dimana anak-anak dan perempuan beberapa hari

mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Yang ketiga, hubungan interaksi dan komunikasi antara masyarakat dengan TNI tidak harmonis lagi. Masyarakat sudah cuek dan tidak mau menyapa para TNI ketika bertemu. Tidak seperti dulu masyarakat masih *welcome* terhadap TNI sekarang sama sekali. Di dislitbang (Dinas Penelitian dan Pengembangan) sendiri terlihat sepi sekali, seperti tidak ada penghuninya, padahal itu ada para TNI tetapi berada didalam. TNI berada di dalam karena tidak berani keluar. Sedangkan dari pihak TNI juga mengalami kerugian dimana papan gapura yang mau menuju dislitbang dirusak oleh masyarakat serta gudang penyimpanan senjata dirusak oleh warga Desa Setrojenar. Dampak positif yang terjadi adalah semakin bertambahnya solidaritas *in-group* masyarakat akibat adanya konflik tersebut. Kesatuan dan persatuan masyarakat menjadi semakin kuat dan semakin berani dalam mengatasi masalah ini.

Sampai sekarang masalah ini belum selesai, belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Upaya dari pemerintah, maupun dari masyarakat sendiri sudah dilakukan. Tetapi belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pada tahun 2002 melakukan dialog dengan pemerintah daerah, tetapi belum ada titik temu diantara kedua belah pihak. Tahun 2009 tepatnya pada bulan Maret, perwakilan dari warga masyarakat Desa Setrojenar, yang tergabung dalam Forum Perkumpulan Petani Kebumen Selatan (FPPKS) mengadakan pertemuan dengan Bupati, kepala Dislitbang, dan pihak-pihak lainnya untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan tersebut membahas

bahwa tidak ada latihan militer sebelum ada kejelasan tentang hak kepemilikan tanah tersebut.

Upaya penyelesaian yaitu dengan adanya pihak ketiga yang menangani masalah ini. Pihak ketiga ini harus benar-benar netral, bijaksana, dan tegas, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak ketiga harus melakukan beberapa langkah seperti, arbitrase (*arbitration*) dimana pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, yang kedua mediasi (*mediation*), mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dan tepat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut.

Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi atau negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Dari pemerintah juga harus melakukan pendataan langsung terhadap hak-hak kepemilikan tanah dengan bekerja sama dengan badan-badan yang ada ditingkat daerah sehingga kejadian sengketa tanah tidak terjadi lagi.

B. Saran

Konflik agraris yang terjadi di Kebumen yaitu antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, sampai sekarang belum terselesaikan. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini harus tepat. Kedua belah pihak harus duduk bersama untuk membahas masalah ini dan mencari kata sepakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini juga harus netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi (*Compromise*) atau negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.

Agar konflik sengketa lahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari diharapkan ada solusi kongkrit dari pemerintah, caranya yaitu dengan memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada, melaksanakan pembaruan agraria. Karena, pelaksanaan reforma agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No.5 Tahun 1960, Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, Pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus penyelesaian konflik agraria di negeri ini. Badan Pertanahan Nasional juga harus mendata kembali kepemilikan tanah yang sudah lama, agar tidak terjadi konflik seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abu Ahmadi. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eko Murdiyanto. 2008. *Sosiologi Pedesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Wisma Press “UPN Veteran”.
- Febriana Muryanto. 2011. “Faktor Penyebab Konflik Slemania dan Brajamusti Dalam Pesepakbolaan Didaerah Yogyakarta”. *Skripsi-S1*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sosiologi. UNY. Yogyakarta.
- Fisher, S. et. al. 2001. *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategis Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Johara T Jayadinata. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Johnson, D.P., 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 2. Jakarta Gramedia
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lexy J Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Persada Karya.
- Manglireau, J.P. 1978. *Penggunaan Lahan Pedesaan (Penafsiran Citra untuk Interpretasi dan Analisisnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pendidikan Interpretasi Citra Penginderaan Jauh dan Survey Terpadu UGM.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Hurbeman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI PRESS.
- Novri Susan. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurfatimah. 2011. “Konflik Sosial Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis”. *Skripsi-S1*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sosiologi. UNY. Yogyakarta.
- Pruitt Dean G, Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Resky Immanuel. 2011. *Pengertian TNI dan Struktur Jabatan TNI* (online). diakses 26 November 2011) ditemukan pada <http://rezkyimmanuel.blogspot.com/2011/06/pengertian-tni-dan-struktur->

[jabatan-tni.html](#).

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Seruu.com. 2011. *Breaking News (konflik sengketa lahan URUT SEWU antara warga dan TNI AD di Kebumen)* (online). (diakses 6 Oktober 2011).
Ditemukan pada:
<http://www.kaskus.us/showthread.php?p=407450048>

Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Suara Karya. 2007. *KONFLIK TANAH (TNI AU Bayar Ganti Rugi Warga Rumpin)* (Online). (diakses 18 April 2011). Ditemukan pada :
http://bitra.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=293:isw&catid=34:advokasi&Itemid=73.

Suara Keadilan Edisi Mei-November. 2011. *Stop Press (Yang Lemah, Yang Diadili)*. Kebumen.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugeng Bayu Wahyono, dkk. 2004. *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM).

Taneko, Solaeman b. 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi :

Tempat :

No	Aspek yang diamati	Keterangan
----	--------------------	------------

1.	Lokasi observasi	
2.	Kondisi sosial masyarakat desa setempat	
3.	Kondisi ekonomi masyarakat desa setempat	
4.	Konflik yang terjadi dalam penggunaan lahan	
5.	Siapa saja yang terlibat	
6.	Faktor penyebab konflik	
7.	Dampak terjadinya konflik	
8.	Ketegangan dalam konflik	
9.	Hubungan antara masyarakat dengan TNI	
10.	Dan lain-lain.	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk Masyarakat Desa Setrojenar

Identitas Diri

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama anda tinggal di desa Setrojenar?
- b. Apakah anda penduduk asli desa Setrojenar?
- c. Bagaimana kondisi masyarakat desa Setrojenar sebelum konflik?

- d. Bagaimana kondisi masyarakat desa Setrojenar sesudah konflik?
- e. Bagaimana status kepemilikan tanah yang menjadi pemicu terjadinya konflik?
- f. Bagaimana hubungan antara masyarakat desa Setrojenar dan TNI sebelum konflik?
- g. Bagaimana hubungan antara masyarakat desa Setrojenar dan TNI sesudah konflik?
- h. Sejak kapan konflik perebutan lahan antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI terjadi?
- i. Apa yang anda ketahui tentang konflik yang terjadi antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI?
- j. Apa yang melatarbelakangi adanya perebutan lahan antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI?
- k. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik perebutan lahan ini?
- l. Menurut anda bagaimana upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut?
- m. Bagaimana peran Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi permasalahan tersebut?
- n. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat Setrojenar setelah terjadi konflik?

2. Untuk Masyarakat militer/TNI

Identitas Diri

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jabatan :
- d. Pendidikan :
- e. Alamat :

Daftar Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai TNI?
- b. Sejak kapan konflik tersebut terjadi?

- c. Menurut anda bagaimana status kepemilikan tanah di kawasan tersebut?
- d. Apa yang melatarbelakangi konflik yang terjadi antara TNI dengan masyarakat sekitar?
- e. Apakah sebelumnya sudah ada upaya perdamaian dari pihak TNI untuk menyelesaikan masalah ini?
- f. Menurut anda solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut itu apa?
- g. Dampak apa yang dialami oleh TNI setelah terjadi konflik dengan masyarakat desa Setrojenar?

3. Untuk Pemerintah Desa

Identitas Diri

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Jabatan :

Daftar Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama anda tinggal di desa Setrojenar?
- b. Apakah anda penduduk asli desa Setrojenar?

- c. Menurut anda tanah atau lahan yang menjadi rebutan itu milik TNI sepenuhnya atau milik masyarakat sekitar?
- d. Sejak kapan masalah perebutan lahan itu terjadi?
- e. Apa tindakan yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi masalah tersebut?
- f. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut?
- g. Menurut anda solusi untuk mengatasi masalah tersebut apa?
- h. Dampak yang terjadi bagi masyarakat Setrojenar itu apa?

Lampiran II

HASIL OBSERVASI

Tanggal Observasi : 12 Mei 2012

Tempat : Desa Setrojenar

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Lokasi observasi	Di desa Setrojenar
2.	Kondisi sosial masyarakat desa setempat	<p>a. Sebelum terjadinya konflik kondisi sosial masyarakat desa Setrojenar biasa saja.</p> <p>b. Kondisi sosial masyarakat setelah konflik mulai stabil masyarakat mulai menata kembali kehidupannya setelah terjadi konflik.</p>
3.	Kondisi ekonomi masyarakat desa setempat	Kondisi ekonomi masyarakat Desa Setrojenar memiliki tingkat ekonomi yang sedang karena masyarakat Desa Setrojenar rata-rata matapencahariannya adalah petani
4.	Konflik yang terjadi dalam penggunaan lahan	Pada tanggal 11 April 2011 TNI tetap melakukan latihan. Dengan sikap TNI yang tetap melakukan latihan maka masyarakat melakukan protes dengan cara membuat blokade jalan yang menuju Dislitbang TNI AD. Kemarahan masyarakat memuncak ketika blokade jalan yang dibuat masyarakat dibongkar oleh TNI. Karena masyarakat marah pada

		<p>saat itu masyarakat merobohkan gapura. Dari situlah konflik mulai memuncak, TNI marah karena jalan menuju Dislitbang diblokade dan gapura yang bertuliskan LATIHAN UJI TEMBAK TNI AD juga dirobohkan oleh masyarakat. TNI melakukan penyerbuan terhadap warga masyarakat dengan melakukan tembakan-tembakan kearah masyarakat.</p>
5.	Siapa saja yang terlibat	Yang terlibat konflik yaitu masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI
6.	Faktor penyebab konflik	<p>Faktor intern penyebab konflik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status kepemilikan dan batas tanah yang belum jelas, menyebabkan masing-masing melakukan pengklaiman terhadap lahan tersebut. b. Tanaman milik masyarakat rusak akibat latihan militer. c. Perbedaan tujuan dalam pemanfaatan lahan yang ada di Desa Setrojenar. <p>Faktor ekstern penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yaitu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang isinya</p>

		<p>tentang Desa Setrojenar dijadikan sebagai wilayah pertahanan dan dijadikan sebagai tempat latihan militer.</p>
7.	Dampak terjadinya konflik	<p>Dampak yang dialami oleh masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat sekarang sudah kehilangan kepercayaan terhadap TNI. b. 14 warga mengalami luka serius akibat ditembak, dan dihajar oleh TNI. c. Kerusakan motor sebanyak 12 motor milik warga masyarakat. d. Anak-anak selama kurang lebih 15 hari merasa ketakutan dan trauma dengan kejadian tersebut. e. Tanaman jadi tidak terawat dan mengalami kerugian karena ditinggal untuk mengungsi selama beberapa hari. f. Hubungan antara masyarakat dengan TNI sekarang tidak harmonis. <p>Dampak yang dialami oleh TNI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TNI mengalami kerugian akibat papan gapura dirusak oleh warga dan gudang senjata juga dirusak oleh warga Desa Setrojenar.

8.	Ketegangan dalam konflik	Ketegangan yang terjadi pada saat konflik sangat mencekam para TNI melakukan penyisiran ke rumah-rumah. Masyarakat ada beberapa hari juga mengungsi ketempat-tempat yang lebih aman. Keadaan desa Setrojenar pada saat itu sepi sekali.
9.	Hubungan antara masyarakat dengan TNI	Hubungan masyarakat sebelum terjadinya konflik itu terjadi sangat baik, tetapi setelah terjadinya konflik hubungan antara masyarakat dengan TNI kurang baik, tidak harmonis. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan omongannya TNI. Di dislitbang setelah terjadi konflik sekarang sepi, tidak ada TNI sama sekali yang berjaga di tempat tersebut.
10.	Dan lain-lain.	